



Renja 2021

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKABUMI

Komplek Perkantoran Jajaway Palabuhanratu

KATA PENGANTAR

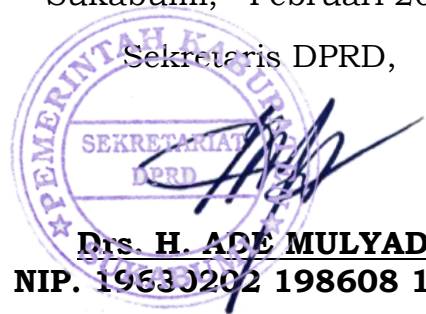
Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021.

Rancangan Renja Perubahan ini disusun sebagai pedoman kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021, berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk mencapai program dan kegiatan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 perlu menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan rancangan Renja Perubahan ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu Kami mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna penyempurnaan Renja Perubahan di masa yang akan datang.

Sukabumi, Februari 2021

Sekretaris DPRD,



Drs. H. ADE MULYADI
NIP. 19630202 198608 1 001

DAFTAR ISI

| | hal |
|---|-----------|
| KATAPENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 1 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021 | 6 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II | 6 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 9 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 10 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 10 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 10 |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 11 |
| BAB IV PENUTUP | 13 |
| 4.1. Kesimpulan | 13 |
| 4.2. Saran-saran | 13 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|----------------------------------|-----|
| | | hal |
| Tabel 1 | Rencana Kerja dan Pendanaan..... | 11 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen rencana strategis (Renstra) yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Sehubungan dengan masih belum maksimalnya pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara administrasi maupun keuangan, perlu dilakukan perubahan rencana kerja Sekretariat DPRD yang disusun dalam rancangan Renja Perubahan tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan rancangan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2021 ini dilakukan dengan melandaskan diri pada sejumlah aturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45);
23. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi ini antara lain adalah:

1. Maksud:

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 adalah agar tersedia dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi yang telah disesuaikan terutama dari sisi anggaran dan akan menjadi acuan dalam melaksanakan operasional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.



2. Tujuan:

- a) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar bidang, antar fungsi maupun antar SKPD;
- b) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- c) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.
- d) Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja Tahun 2021, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana program, kegiatan, jumlah anggaran dan indikator kinerja.

BAB IV P E N U T U P

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan IV

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 sampai dengan triwulan IV, terdapat 1 (satu) program utama dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Dalam tahun 2021 pencapaian sasaran meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD kabupaten sukabumi dalam produktifitas kedewanan menunjukkan hasil yang positif. Sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai yaitu persentasi fasilitasi keikutsertaan bintek Pimpinan dan Anggota DPRD. Sampai dengan triwulan II **realisasi kinerja indikator sasaran ini tercapai sebanyak 100% dari target 98%**. Realisasi ini diperoleh dari keikutsertaan seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi mengikuti Bintek/Sejenisnya.

Untuk pencapaian sasaran tersedianya produk hukum yang diperlukan masyarakat menunjukkan hasil yang belum maksimal. Sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai persentase fasilitasi penetapan peraturan daerah yang sampai dengan triwulan II terealisasi 33,33% dari target 75%. Sampai dengan triwulan II pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) yang difasilitasi sebanyak 4 (empat) raperda dari jumlah usulan raperda keseluruhan dalam propemperda (program pembahasan peraturan daerah) sebanyak 12 (dua belas) raperda. Namun sesungguhnya secara kinerja, seluruh kegiatan raperda telah difasilitasi pembahasannya, sampai dengan triwulan II pembahasan raperda ada 4 (empat) raperda dan seluruhnya difasilitasi pembahasannya atau tercapai 100%.

Untuk indikator sasaran persentasi keikutsertaan bintek Pimpinan dan Anggota DPRD pencapaiannya pada tahun 2021 didukung dengan

Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 2.156.704.400,00 dengan kegiatan antara lain :

- 1) Pembahasan Rancangan Perda , dengan anggaran sebesar Rp 1.906.704.400,00 terealisasi sampai triwulan IV sebesar Rp. 1.510.828.300,00 atau 79,24%. Keluaran dari kegiatan ini yaitu Jumlah Raperda yang dibahas 23 Raperda, FGD Raperda Inisiatif 5 kali, Kaji Terap Raperda Inisiatif 5 kali.
- 2) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/keterangan Naskah Akademik, dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00. Sampai dengan triwulan IV Terealisasi sebesar Rp. 244.165.000,00 atau 97,67% Keluaran kegiatan ini yaitu, Naskah akademik 5 dokumen

Program Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp.218.394.000,00 Dengan Kegiatan Antara Lain :

- 1) Pembahasan KUA dan PPAS dengan anggaran sebesar Rp. 28.506.000,00. Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp.28.476.000,00. Atau 66,35%. Keluaran kegiatan ini yaitu : jumlah rapat Pembahasan KUA dan PPAS 3 kali
- 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan anggaran sebesar Rp. 29.052.000,00. Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp.29.052.000,00. Atau 100%. Keluaran kegiatan ini yaitu : Jumlah rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3 kali.
- 3) Pembahasan APBD dengan anggaran sebesar Rp. 160.836.000,00 Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp.87.386.000,00. Atau 54,33%. Keluaran kegiatan ini yaitu : Jumlah rapat Pembahasan APBD 9 kali

Program Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp.163.124.000,00 Dengan Kegiatan Antara Lain :

- 1) Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum sebesar Rp. 35.964.000,00 Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 35.964.000,00. Atau 100%. Keluaran kegiatan ini yaitu : Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum 10 kali
- 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur sebesar Rp. 41.467.000,00 Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 41.467.000,00. Atau 100%. Keluaran kegiatan ini yaitu :

Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur 12 kali

- 3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 77.337.000,00 Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 77.295.000,00. Atau 99,95%. Keluaran kegiatan ini yaitu : Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 11 kali
- 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian sebesar Rp. 8.176.000,00 Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 8.176.000,00. Atau 100%. Keluaran kegiatan ini yaitu : Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 2 kali
- 5) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian sebesar Rp. 8.176.000,00 Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 8.176.000,00. Atau 100%. Keluaran kegiatan ini yaitu : Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 2 kali

Program Peningkatan Kapasitas DPRD pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp.6.358.170.400,00 Dengan Kegiatan Antara Lain :

- 1) Pendalaman Tugas DPRD sebesar Rp1.726.460.000,00 Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 1.650.974.498,00 Atau 95,63%. Keluaran kegiatan ini yaitu : Jumlah Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota 4 kali, Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Mengikuti Pendalaman Tugas 49 orang, Jumlah Pembinaan Iedologi dan Wawasan Kebangsaan 1 kali
- 2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan sebesar Rp2.512.462.400,00 Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 2.450.503,00 Atau 97,53%. Keluaran kegiatan ini yaitu : Jumlah Adventorial 377 media, jumlah iklan 50 media, Jumlah Langganan surat kabar 12 bulan
- 3) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi sebesar Rp 374.400.000,00 Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 364.800.000,00 Atau 97,44%. Keluaran kegiatan ini yaitu : Jumlah tenaga ahli 8 orang
- 4) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat sebesar Rp 1.744.848.000 ,00Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp1.722.561.500,00 Atau 98,72%. Keluaran kegiatan ini yaitu : Jumlah hearing ketua 29 kali, jumlah hearing wakil ketua 15 kali.

Program Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat dengan anggaran sebesar Rp3.730.722.000,00 Dengan Kegiatan Antara Lain :

- 1) Pelaksanaan Reses sebesar Rp 3.730.722.000,00 Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp3.718.040.000,00 Atau 99,66%. Keluaran kegiatan ini yaitu : Jumlah reses DPRD 3 kali, Jumlah Lokasi Reses Peranggota DPRD 12 Lokasi.

Program Fasilitasi Tugas DPRD dengan anggaran sebesar Rp.2.742.616.000,00 Dengan Kegiatan Antara Lain :

- 1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebesar Rp 2.653.950.000,00 Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 2.377.024.140,00 Atau 89,57%. Keluaran kegiatan ini yaitu : Jumlah Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi Komisi 3 kali, Jumlah Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi Pimpinan 4 kali, Jumlah Kunjungan Kerja Luar Daerah Luar Provinsi Komisi 2 kali, Jumlah Kunjungan Kerja Luar Daerah Luar Provinsi Pimpinan 2 kali, Jumlah Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi Badan Anggaran 1 kali, Jumlah Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi Badan Kehormatan 1 kali, Jumlah Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi Badan Musyawarah 1 kali, Jumlah Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi Bapemperda 1 kali
- 2) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD sebesar Rp 88.666.000,00 Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp10.720.000,00Atau 12,09%. Keluaran kegiatan ini yaitu : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dan undangan Pimpinan DPRD 1 kali, Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dan undangan anggota DPRD 1 kali.

Program Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRDdengan anggaran sebesar Rp.28.708.579.941,00 Dengan Kegiatan Antara Lain :

- 1) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD sebesar Rp 165.000.000,00 Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 164.700.000,00 Atau 99,82%. Keluaran kegiatan ini yaitu : Jumlah

PSH DPRD 50 stel, Jumlah Pakaian adat Sunda DPRD 0 stel, Jumlah Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 50 stel

- 2) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD sebesar Rp46.203.750,00 Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 0,00 Atau 99,82%. Keluaran kegiatan ini yaitu : Jumlah Pimpinan dan Anggota yang mengikuti medical check up 50 orang
- 3) Penyelenggaraan administrasi keunagan DPRD sebesar Rp28.497.376.191,00 Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 0,00 Atau 0,00. Keluaran kegiatan ini yaitu : Gaji dan tunjangan DPRD 12 bulan

Layanan Administrasi DPRD dengan anggaran sebesar Rp1.811.210.800,00 Dengan Kegiatan Antara Lain :

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD sebesar Rp 73.466.000,00 Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 72.489.000,00 Atau 98,67%. Keluaran kegiatan ini yaitu : Layanan Administrasi Kepegawaian 1 dokumen.
- 2) Fasilitasi Fraksi DPRD sebesar Rp 60.000.000,00 Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 59.100.000,00 Atau 98,50%. Keluaran kegiatan ini yaitu : Jumlah Rapat Fraksi 24 kali
- 3) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD sebesar Rp1.527.744.800,00 Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 1.519.043.750,00 Atau 99,43%. Keluaran kegiatan ini yaitu : Jumlah Rapat Badan Kehormatan 11 kali, Jumlah Rapat Internal Badan Anggaran 7 kali, Jumlah Rapat Internal Badan Musyawarah 8 kali, Jumlah Rapat Badan Musyawarah dengan Mitra 8 kali, Jumlah Rapat Internal Komisi 14 kali, Jumlah Rapat Komisi dengan Mitra 25 kali, Jumlah Rapat Pimpinan 17 kali, Jumlah Rapat Pansus 10 kali, Jumlah Rapat Paripurna 36 kali, Jumlah Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan 1 kali, Jumlah Rapat Paripurna Hari Jadi 1 kali,
- 4) Pennyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD sebesar Rp150.000.000,00 Sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar

Rp 0,00 Atau 0,00. Keluaran kegiatan ini yaitu : belanja rumah tangga ketua DPRD 12 bulan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi kepada pimpinan dan anggota DPRD pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi, didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi. Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dari hasil evaluasi kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam RKPD sampai dengan triwulan IV tahun 2020 dengan realisasi sebesar 83,33%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari kendala dan permasalahan



yang merupakan isu penting. Adapun isu-isu tersebut antara lain :

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Belum optimalnya pengelolaan administrasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi baik administrasi kesekretariatan maupun administrasi keuangan;
3. Belum optimalnya pelayanan dan fasilitasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi;
4. Belum Optimalnya koordinasi dan kerjasama baik intern maupun ekstern.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan. Secara garis besar perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dilakukan sebagai penyesuaian dengan DPA tahun anggaran 2020 baik dari segi kode rekening (susunan kegiatan), nama kegiatan, target indikator kinerja maupun nilai pagu anggaran. Hampir seluruh kegiatan yang tercantum dalam DPA 2020 mengalami penyesuaian baik dari target indikator kinerja maupun nilai pagu anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahun 2020 tidak terdapat usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan/dari masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi.



BAB III**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja Perubahan dan pendanaan Sekretariat DPRD tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR SASARAN | URAIAN KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (Rp) | LOKASI |
|----|---|--|---|--------------------|------------------------|
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah | | | |
| | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | Meningkatnya Perencanaan dan Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Tepat Waktu | Renstra,renja,renja Perubahan,Perjanjian Kinerja ,RKA,DPA,RKA-P,DPPA,Laporan Appraisal Tunjangan DPRD | 266.606.000 | Sekretariat DPRD |
| - | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Meningkatnya Perencanaan dan Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Tepat Waktu | | 139.818.000 | Sekretariat DPRD |
| - | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Meningkatnya Perencanaan dan Tersedianya Laporan Capaian kinerja Tepat Waktu | Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Evaluasi Renja,LKj,LPPD,LKPJ | 75.557.500 | Sekretariat DPRD |
| - | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Perencanaan dan Tersedianya Laporan Capaian kinerja Tepat Waktu | Meningkatnya Perencanaan dan tersedianya laporan capaian kinerja tepat waktu | 51.230.500 | Sekretariat DPRD |
| | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | Tersedianya laporan pengelolaan keuangan tepat waktu | Gaji dan Tunjangan ASN | 4.171.316.164 | Setwan dan Luar Setwan |
| - | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya laporan pengelolaan keuangan tepat waktu | | 4.037.701.064 | |
| - | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya laporan pengelolaan keuangan tepat waktu | Laporan dan bukti pertanggungjawaban | 64.562.500 | Sekretariat DPRD |
| - | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya laporan pengelolaan keuangan tepat waktu | Laporan keuangan | 69.052.600 | Sekretariat DPRD |
| | <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | Terfasilitasinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | 935.592.400 | Sekretariat DPRD |
| - | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Meningkatnya Disiplin Berpakaian dinas | PDH, Sepatu | 51.741.400 | Sekretariat DPRD |
| - | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Workshop ASDEKSI/Diklat/Sejenisnya undangan dari luar | 335.054.000 | Sekretariat DPRD |
| - | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan | Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimtek/sejenisnya | 548.797.000 | Sekretariat DPRD |
| | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | Terfasilitasinya sarana dan prasarana dan pelayanan administrasi perkantoran | | 1.443.988.384 | Sekretariat DPRD |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---------------|------------------|
| - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terfasilitasinya sarana dan prasarana dan pelayananan administrasi perkantoran | Alat listrik dan elektronik | 28.239.000 | Sekretariat DPRD |
| - | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terfasilitasinya sarana dan prasarana dan pelayananan administrasi perkantoran | Perkakas,lampu senter,notebook,camera | 178.219.500 | Sekretariat DPRD |
| - | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terfasilitasinya sarana dan prasarana dan pelayananan administrasi perkantoran | Tabung gas,baligo,spanduk,karangan bunga | 598.960.000 | Sekretariat DPRD |
| - | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terfasilitasinya sarana dan prasarana dan pelayananan administrasi perkantoran, barang cetakan | Fotokopi,penjilidan | 162.505.000 | Sekretariat DPRD |
| - | Penyediaan Bahan/Material | Terfasilitasinya sarana dan prasarana dan pelayananan administrasi perkantoran | Alat tulis kantor | 185.843.884 | Sekretariat DPRD |
| - | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terfasilitasinya sarana dan prasarana dan pelayananan administrasi perkantoran | Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah | 290.221.000 | |
| | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | Tersfasilitasinya Sarana Prasarana Pimpinan, anggota DPRD dan Aparatur sekretariat DPRD | | 1.621.597.600 | Sekretariat DPRD |
| - | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersfasilitasinya Sarana Prasarana Pimpinan, anggota DPRD dan Aparatur sekretariat DPRD | taman | 732.217.700 | Sekretariat DPRD |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersfasilitasinya Sarana Prasarana Pimpinan, anggota DPRD dan Aparatur sekretariat DPRD | Sumur arbesis,taman dengan pengijauan,toilet,tiang bendera | 697.722.400 | |
| - | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersfasilitasinya Sarana Prasarana Pimpinan, anggota DPRD dan Aparatur sekretariat DPRD | Video confrence,SIM e-Reses,video kilas balik DPRD | 191.657.500 | |
| | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | Terfasilitasinya Jasa Penunjang Pelayananan Sekretariat DPRD | | 3.453.300.000 | |
| - | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terfasilitasinya Jasa Penunjang Pelayananan Sekretariat DPRD | Listrik,telepon,internet,paket,rettribusi kebersihan | 356.600.000 | |
| - | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terfasilitasinya Jasa Penunjang Pelayananan Sekretariat DPRD | Tenaga administrasi S1,D3,D1 Kewah ,supir,tenaga keamanan,tenaga kebersihan, da'i | 3.096.700.000 | |
| | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | Terpeliharanya barang milik daerah | | 1.162.081.780 | Sekretariat DPRD |
| - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya barang milik daerah | Mobil jabatan | 312.295.000 | Sekretariat DPRD |
| - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya barang milik daerah | Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 | 483.120.000 | Sekretariat DPRD |
| - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya barang milik daerah | Gedung yang dicat,mushola yang diperbaiki | 169.347.600 | Sekretariat DPRD |
| - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya barang milik daerah | Mesin pemotong rambut,genzet, AC,PC/Notebook, printer,gazebo yang diperbaiki | 106.521.200 | Sekretariat DPRD |

| | | | | | |
|---|--|--|---|----------------|--------------------------|
| - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya barang milik daerah | SIM SPPD Yang di upgrade, website DPRD Yang di upgrade | 90.167.980 | |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Jumlah Raperda yang dibahas | | | Dalam Kabupaten Sukabumi |
| | <i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i> | Terfasilitasinya Fungsi Legislasi DPRD | | 45.889.521.541 | |
| - | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Terfasilitasinya Fungsi Legislasi DPRD | Jumlah Rapat Bapemperda, keputusan DPRD tentang propemperda | 0 | |
| - | Pembahasan Rancangan Perda | Terfasilitasinya Fungsi Legislasi DPRD | FGD Raperda inisiatif, kaji terap raperda | 1.906.704.400 | |
| - | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Terfasilitasinya Fungsi Legislasi DPRD | Naskah akademik | 250.000.000 | Sekretariat DPRD |
| | <i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i> | Terfasilitasinya Fungsi Anggaran DPRD | | 218.394.000 | Dalam Kabupaten Sukabumi |
| - | Pembahasan KUA dan PPAS | Terfasilitasinya Fungsi Anggaran DPRD | KUA, PPAS | 28.506.000 | Dalam Kabupaten Sukabumi |
| - | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Terfasilitasinya Fungsi Anggaran DPRD | KUA, PPAS Perubahan | 29.052.000 | Luar Kabupaten Sukabumi |
| - | Pembahasan APBD | Terfasilitasinya Fungsi Anggaran DPRD | Rapat pembahasan anggaran | 160.836.000 | Sekretariat DPRD |
| - | Pembahasan APBD Perubahan | Terfasilitasinya Fungsi Anggaran DPRD | Rapat pembahasan APBD-P | 0 | Sekretariat DPRD |
| - | Pembahasan Laporan Semester | Terfasilitasinya Fungsi Anggaran DPRD | Pembahasan laporan semester | 0 | |
| - | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Terfasilitasinya Fungsi Anggaran DPRD | Pertanggungjawaban APBD | 0 | |
| | <i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i> | Jumlah Rapat Pembahasan LKPJ | | 163.124.000 | |
| - | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Terfasilitasinya fungsi pengawasan DPRD | | 35.964.000 | |
| - | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Terfasilitasinya fungsi pengawasan DPRD | | 41.647.000 | |
| - | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Terfasilitasinya fungsi pengawasan DPRD | | 77.337.000 | |
| - | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Terfasilitasinya fungsi pengawasan DPRD | | 8.176.000 | |
| - | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Terfasilitasinya fungsi pengawasan DPRD | | 0 | |
| | <i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i> | Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD | | 6.358.170.400 | |
| - | Pendalaman Tugas DPRD | Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD | Pendalaman tugas anggota DPRD dan Pimpinan, | 1.726.460.000 | |
| - | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD | Adventorial, surat kabar, iklan | 2.512.462.400 | |
| - | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah tenaga ahli | 374.400.000 | |
| - | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD | hearing ketua dan wakil ketua | 1.744.848.000 | |
| | <i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i> | Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | 3.730.722.000 | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|---|----------------------|--|
| - | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD | 0 | |
| - | Pelaksanaan Reses | Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | lokasi reses per anggota DPRD | 3.730.722.000 | |
| | <i>Fasilitasi Tugas DPRD</i> | Terfasilitasinya Tugas-tugas DPRD | | 2.742.616.000 | |
| - | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Terfasilitasinya Tugas-tugas DPRD | Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi Komisi, Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi Pimpinan, Kunjungan Kerja Luar Daerah Luar Provinsi Pimpinan, Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi Badan Anggaran | 2.653.950.000 | |
| - | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Terfasilitasinya Tugas-tugas DPRD | Koordinasi dan konsultasi dan undangan pimpinan DPRD dan anggota DPRD | 8.666.000 | |
| | <i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i> | Terfasilitasinya Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | |
| - | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Terfasilitasinya Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Gaji dan tunjangan DPRD | | |
| - | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Terfasilitasinya Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | PSH DPRD, Pakaian adat sunda DPRD, Pakaian dinas harian lenga panjang | | |
| - | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Terfasilitasinya Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti medical check up | | |
| | <i>Layanan Administrasi DPRD</i> | Terfasilitasinya Layanan Administrasi DPRD | | | |
| - | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Terfasilitasinya Layanan Administrasi DPRD | Laporan administrasi kepegawaian | | |
| | Fasilitasi Fraksi DPRD | Terfasilitasinya Layanan Administrasi DPRD | Rapat fraksi | | |
| - | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Terfasilitasinya Layanan Administrasi DPRD | Rapat internal badan kehormatan, rapat internal badan anggaran, rapat internal badan musyawarah | | |
| - | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Terfasilitasinya Layanan Administrasi DPRD | Belanja rumah tangga ketua DPRD | | |
| Jumlah Anggaran | | | | 6.667.380.000 | Terfasilitasinya Layanan Administrasi DPRD |

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi tahun 2020 sesuai dengan fungsinya yaitu merupakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan masing-masing Bagian, dimana Renja Perubahan ini disusun dengan memperhatikan kondisi objektif baik menyangkut kompetensi personal, kemampuan anggaran dan kewenangan yang dimiliki. Sehubungan dengan itu maka semua unit kerja (Bagian) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat mempedomani Renja Perubahan ini.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan perencanaan yang matang serta diperlukan etos kerja yang tinggi. Indikator keberhasilan pelaksanaan Renja sangat tergantung kepada komitmen yang telah disepakati dan dalam pelaksanaannya harus konsisten sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4.2. Saran-saran

1. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif baik internal maupun eksternal.
2. Menambah kuantitas dan kualitas personil Sekretariat DPRD terutama yang kompeten dalam perencanaan dan keprograman dengan mengikutsertakan dalam berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan.

Palabuhanratu, Februari 2021

Sekretaris DPRD,


Drs. H. ADE MULYADI

Pembina Utama Muda

NIP.19630202198608 1 001

